

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**



**Nama : Wahyu Jepriansyah  
NIM : 222015173**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Wahyu Jepriansyah  
NIM : 222015173**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Faktor-Faktor Tidak Tercapainya Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan  
Nama : Wahyu Jepriansyah  
NIM : 22 2015 173  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

**Drs. Sunardi, SE., Ak. M.Si**  
NIDN/NBM: 020604630/784021

Pembimbing II,

**Darmayanti, SE., Ak. M.Si**  
NIDN/NBM: 0219057901/1187172

Mengetahui,  
Dekan  
u.p. ketua Program Studi Akuntansi



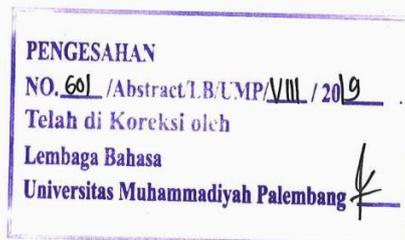
**Betri, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

### Abstract

Wahyu Jepriansyah / 222015173 / 2019 / *The Factors Analysis of Not Achieving the Targets of Own-Source Revenue in the Government of South Sumatra Province*

*The formulation of the problem study were the factors of not the targets of own-source revenue in the government of South Sumatra province. The aim was to find out the factors of not achieving the targets of own-source revenue in the government of South Sumatra province. This type of research was descriptive research. The variables were the factors of not achieving original income. The data used primary data with data collection techniques using documentation. Analysis of the data used qualitative analysis to analyze the existing form of description to determine the factors of not achieving the original local income according to theory and facts. There were 6 indicators of the factors not achieving local revenue, namely: (1) Lack of sensitivity of the region in finding cultural superiority and potential of the region (2) Compliance and awareness of taxpayers or relatively low fees (3) Weak legal and administrative systems regional income (4) Weaknesses in the quality of the human resources of the apparatus (5) Bureaucratic concerns about failure to run the program (6) Often the expenditure used to run the program was increased from the beginning of each budget. The results of research and discussion indicated that the factors of not achieving local revenue were (1) Lack of facilities and infrastructure (2) Lack of awareness and non-compliance of individuals and employers paying taxes (3) Lack of firmness and injustice in providing sanctions / penalties (4) Poorly supported by the personnel information system (5) Errors of bureaucratic management itself (6) Not reaching the revenue budget.*

*Keywords: The factors that cause not achieving the targets of own-source revenue.*



## **ABSTRAK**

### **Wahyu Jepriansyah/222015173/2019/Analisis Faktor-Faktor tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor tidak tercapainya target pendapatan asli daerah pada pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor tidak tercapainya target pendapatan asli daerah pada pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah faktor-faktor tidak tercapainya pendapatan asli daerah. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif menganalisis bentuk uraian yang ada untuk mengetahui faktor faktor tidak tercapainya pendapatan asli daerah menurut teori dan fakta. Indikator dari faktor-faktor tidak tercapainya pendapatan asli daerah ada 6, yaitu : (1) Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah (2) Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah (3) Lemahnya Sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah (4) Kelemahan kualitas SDM aparatur (5) Kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya (6) Sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan sejak awal setiap anggaran. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor tidak tercapainya pendapatan asli daerah yaitu (1) Kurangnya sarana dan prasarana (2) Kurangnya kesadaran dan tidak kepatuhan orang pribadi dan pengusaha membayar pajak (3) Kurangnya ketegasan dan tidakadilan dalam memberikan sanksi/hukuman (4) Kurang didukung oleh sistem informasi kepegawaian (5) Kesalahan manajemen birokrasi itu sendiri (6) Tidak tercapainya anggaran pendapatan

**Kata kunci : Faktor penyebab tidak tercapainya pendapatan asli daerah.**



## PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis faktor-faktor tidak tercapainya pendapatan asli daerah pada Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku Ibu Ernani dan Ayah Junaidi yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunardi, SE.,M.Si dan Ibu Darmayanti, S.E., Ak., M.M., CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR.H.Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Wakil Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan seluruh staff Galery investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin

Palembang, September 2019  
Penulis

Wahyu Jepriansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN/COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori .....	9
1. Pendapat Asli Daerah .....	9
2. Sumber-Sumber Pendapat Asli Daerah .....	10

1) Pajak daerah .....	10
2) Retribusi Daerah .....	21
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah .....	22
4) Lain-lain Pad yang sah .....	22
3. Faktor-faktor tidak tercapainya PAD .....	23
B. Penelitian Sebelumnya .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Operasionalisasi Variabel .....	28
D. Data yang Diperlukan .....	28
E. Metode Pengumpulan Data .....	29
F. Analisis Data .....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	31
1. Gambaran Singkat DJPK .....	31
a. Sejarah DJPK .....	31
b. Visi dan Misi .....	32
c. Tugas pokok dan fungsi .....	33
2. Gambaran Singkat BPKAD .....	35
a. Sejarah BPKAD .....	35
b. Visi dan Misi .....	36
c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	36

d. Uraian tugas pokok dan fungsi.....	38
1) Kepala Badan .....	38
2) Sekretaris.....	42
3) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah .....	45
4) Bidang Perbendaharaan Daerah.....	46
5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah .....	48
6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan, bertanggung jawab maksudnya itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar dipelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dalam sistem otonomi daerah, ada tiga prinsip menurut UU No.23 Tahun 2014 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum, Sedangkan tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan tugas tertentu.

Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan Pemerintah secara penuh terhadap daerah otonom untuk mengelola daerahnya dalam berbagai aspek

diantaranya adalah aspek keuangan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2008, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka daerah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ciri utama kemandirian suatu daerah dapat di lihat dari keuangan daerah dimana kemampuan daerah mengelola keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Aryanti, 2015)

Pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Semua kegiatan pemerintah daerah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Manajemen keuangan daerah yang tercermin dalam APBD merupakan sarana penting pemerintah daerah dalam melakukan pengalokasian sumber daya daerah secara optimal, serta merupakan media yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Sebagai sarana penting maka setiap pengeluaran pemerintah harus diperuntukan untuk kepentingan publik dan wajib dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan dalam bentuk alokasi anggaran publik diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar terciptanya kemandirian suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan asli daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan

fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sumber dana yang didapatkan pemerintah diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kualitas ekonomi daerah, sehingga dapat dikatakan mandiri dalam bidang keuangan daerah dan semakin menurun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Najib (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara signifikan, yang diketahui dari keempat variabel independen yaitu pajak daerah, perusahaan milik daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah yang berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Jaya & Widanta (2014) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar. Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan terhadap PAD kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh terhadap PAD, variabel PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap PAD.

Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatra. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis, terletak antara 1-4° Lintang Selatan dan 102-106° Bujur Timur, dan luas daerah

seluruhnya adalah 87.017.41  $Km^2$ . Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, Provinsi Kep. Bangka-Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota Provinsi.

Berikut ini sebagian data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel I.1**  
**Ringkasan Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017**

Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian
Lahat	2015	92,074,000,000	189,584,741,246	205%
	2016	97,733,000,000	184,972,794,850	189%
	2017	134,434,440,737	164,495,177,551	122%
Musi Banyuasin	2015	209,787,000,000	181,795,444,466	86%
	2016	229,005,000,000	169,012,416,526	74%
	2017	203,693,548,000	209,410,035,753	103%
Musi Rawas	2015	100,031,000,000	97,998,166,924	98%
	2016	105,070,000,000	96,743,870,854	92%
	2017	115,000,000,000	149,420,822,126	129%
Muara Enim	2015	141,775,000,000	178,245,088,810	125%
	2016	167,904,000,000	150,912,522,963	90%
	2017	161,959,610,649	226,929,233,264	140%
Ogan Komering Ilir	2015	138,653,000,000	110,225,039,890	79%
	2016	332,007,000,000	108,992,378,484	33%
	2017	309,041,993,208	222,803,215,920	72%
Ogan Komering Ulu	2015	106,821,000,000	98,756,154,905	92%
	2016	104,632,000,000	87,578,643,415	88%
	2017	81,066,358,921	172,039,307,591	212%
Palembang	2015	773,614,000,000	736,926,505,928	95%
	2016	777,398,000,000	781,413,947,765	100%
	2017	894,010,465,678	1,091,704,605,854	122%
Prabumulih	2015	78,442,000,000	72,236,033,964	92%

	2016	89,087,000,000	86,253,193,266	96%
	2017	104,330,028,000	119,192,660,726	114%
<b>Pagaralam</b>	2015	35,765,000,000	53,418,726,124	149%
	2016	50,114,000,000	51,113,017,419	101%
	2017	52,126,071,576	65,643,816,886	125%
<b>Lubuk Linggau</b>	2015	66,299,000,000	66,725,204,495	101%
	2016	77,465,000,000	75,797,426,519	97%
	2017	82,747,948,000	115,521,939,795	139%
<b>Banyuasin</b>	2015	96,739,000,000	96,219,655,177	99%
	2016	94,171,000,000	104,218,245,467	110%
	2017	107,759,158,994	125,984,368,887	116%
<b>Ogan Ilir</b>	2015	52,411,000,000	42,843,410,495	81%
	2016	170,505,000,000	109,762,617,127	64%
	2017	283,501,663,673	107,306,547,577	37%
<b>OKU Timur</b>	2015	53,258,000,000	42,843,410,495	80%
	2016	53,116,000,000	69,357,438,646	130%
	2017	64,785,580,600	77,724,678,268	119%
<b>OKU Selatan</b>	2015	39,355,000,000	38,197,172,489	97%
	2016	41,160,000,000	35,696,934,794	86%
	2017	42,495,000,000	25,768,872,898	60%
<b>Empat Lawang</b>	2015	25,480,000,000	27,118,381,319	106%
	2016	31,470,000,000	22,347,811,179	71%
	2017	35,332,586,630	68,806,714,653	194%
<b>Penungkal Abab Lematang Ilir</b>	2015	18,479,000,000	4,236,965,850	23%
	2016	32,898,000,000	26,350,314,142	80%
	2017	56,924,052,876	56,823,104,638	99%
<b>Musi Rawas Utara</b>	2015	21,016,000,000	29,172,475,399	138%
	2016	26,428,000,000	32,174,860,897	121%
	2017	34,120,458,091	34,324,496,818	101%

**Sumber : DJPK Kemenkeu Republik Indonesia 2019**

Tabel I.1 Menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2017 khususnya pada kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan OKU Selatan belum mencapai target yang optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Tidak**

## **Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, faktor-faktor apa tidak tercapainya target pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari Perumusan Masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui apa faktor-faktor tidak tercapainya target pendapatan asli daerah pada Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat semua pihak diantaranya :

#### **1. Bagi Penulis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah pada Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengelola APBD serta mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik.

### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Carunia Mulya Sayekti. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Diana Lestari. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. Jurnal Universitas Tarumanegara.

Diana Lestari. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. Jurnal Universitas Tarumanegara.

Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi.

Misbahuddin dan Iqbal Hasan. (2014). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Putu Adhi Guna Wijaya. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. E-Jurnal EP Unud, 8 [2]: 359-38

Riandani Rezki Prana. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi*. Jurnal Ilman, Vol 4, No. 1, pp. 77-86.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

*Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009*